

DINAMIKA KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO: TREN, TANTANGAN, DAN STRATEGI PENANGGULANGAN 2012–2022

Fitri Hadi Yulia Akib¹ · Moh. Arif Novriansyah² , Eduart Wolok³

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Gorontalo¹

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Gorontalo²

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Gorontalo³

Email: fitrihadiyulia@ung.ac.id¹

Abstract: *This study examines the dynamics of poverty in Gorontalo Province during the period 2012–2022, including analysis of changing trends, causal factors, and the effectiveness of alleviation policies. Poverty in Gorontalo remains a significant challenge, with the poverty rate decreasing from 17.22% in 2012 to 15.42% in 2022. However, disparities between urban and rural areas remain striking, reflecting limited access to education, health, and economic opportunities. The main objective of this study is to provide a more holistic understanding of the multidimensional factors that influence poverty and recommend evidence-based policies for improvement. The study uses a descriptive quantitative approach with secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and other institutional reports. The analysis includes descriptive statistics, temporal trends, and spatial trends to map changes in poverty indicators, income inequality, and the Human Development Index (HDI). Data visualization such as graphs and tables are used to support the interpretation of the results. The results show that absolute, relative, and cultural poverty significantly affect the lives of the Gorontalo people. The poverty line in urban areas has increased more sharply than in rural areas, due to urbanization and cost of living pressures. The poverty depth and severity index shows fluctuations, reflecting the limited effectiveness of alleviation programs. Government policies, such as the Productive Economic Business Assistance (UEP), although having a positive impact, only cover a small portion of the poor. More holistic programs are needed to improve access to education, health, and local economic opportunities. This study emphasizes the need for integrated and data-based policies to address economic and social inequality in Gorontalo. A region-based approach and improving rural infrastructure are the main recommendations for achieving inclusive and sustainable development. The results of this study are expected to be the basis for formulating more effective and adaptive policies in the future.*

Keywords: *Dimensions of poverty, regional disparities and policy effectiveness*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dinamika kemiskinan di Provinsi Gorontalo selama periode 2012–2022, yang mencakup analisis tren perubahan, faktor penyebab, dan efektivitas kebijakan pengentasan. Kemiskinan di Gorontalo tetap menjadi tantangan signifikan, dengan angka kemiskinan menurun dari 17,22% pada 2012 menjadi 15,42% pada 2022. Meskipun demikian, disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap mencolok, mencerminkan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap faktor-faktor multidimensi yang memengaruhi kemiskinan dan merekomendasikan kebijakan berbasis bukti untuk perbaikan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan institusi lainnya. Analisis mencakup statistik deskriptif, tren temporal, dan spasial untuk memetakan perubahan indikator kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Visualisasi data seperti grafik dan tabel digunakan untuk mendukung interpretasi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan absolut, relatif, dan kultural memengaruhi kehidupan masyarakat Gorontalo secara signifikan. Garis kemiskinan di wilayah perkotaan meningkat lebih tajam dibandingkan pedesaan, akibat urbanisasi dan tekanan biaya hidup. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan fluktuasi, mencerminkan efektivitas program pengentasan yang masih terbatas. Kebijakan pemerintah, seperti Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), meski memiliki dampak positif, hanya mencakup sebagian kecil masyarakat miskin. Program yang lebih holistik diperlukan untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi lokal. Penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial di Gorontalo. Pendekatan berbasis wilayah dan peningkatan infrastruktur pedesaan menjadi rekomendasi utama untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk formulasi kebijakan yang lebih efektif dan adaptif di masa depan.

Kata kunci: Dimensi kemiskinan, kesenjangan regional dan efektivitas kebijakan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensi, melampaui sekadar kekurangan pendapatan untuk mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya yang penting bagi kesejahteraan manusia (Sen, 1999). Dalam konteks pembangunan, pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tujuan utama tetapi juga prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, kemiskinan tetap menjadi isu yang mendesak, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya seperti Provinsi Gorontalo. Dinamika kemiskinan di Gorontalo mencerminkan berbagai faktor struktural, geografis, dan sosial-ekonomi yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Fakta sosial menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan di Gorontalo telah menurun dari 17,22% pada tahun 2012 menjadi 15,42% pada tahun 2022, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (BPS, 2022). Fenomena ini mencerminkan kesenjangan yang mendalam antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Ketimpangan pendapatan, yang diukur melalui koefisien Gini, menunjukkan tren penurunan dari 0,426 pada tahun 2012 menjadi 0,411 pada tahun 2022, tetapi angka ini tetap berada di atas ambang batas yang mencerminkan tingkat ketimpangan signifikan (BPS, 2022). Fakta ini memperkuat perlunya kajian yang lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mendasari ketidakmerataan hasil pembangunan di Gorontalo.

Dari perspektif teori, kemiskinan sering kali dipahami sebagai hasil dari interaksi antara faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Menurut teori pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP, indikator seperti pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat merupakan dimensi utama yang memengaruhi kualitas hidup (UNDP, 2022). Rendahnya partisipasi pendidikan menengah, tingginya prevalensi stunting, serta ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian dengan produktivitas rendah merupakan isu yang saling terkait dan memperburuk kemiskinan di wilayah tertentu. Partisipasi pendidikan yang rendah di tingkat menengah dapat mengakibatkan kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Penelitian oleh Utama & Soesanti, 2019 menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan partisipasi pendidikan dapat berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, Teori ketergantungan (*dependency theory*) menjelaskan bagaimana wilayah-wilayah yang kurang berkembang, seperti Gorontalo, sering terjebak dalam ketergantungan pada sektor primer. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap teknologi dan pasar yang lebih luas, yang menghambat kemampuan daerah tersebut untuk beralih ke sektor yang lebih beragam dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, sektor primer, seperti pertanian dan perikanan, sering kali menjadi satu-satunya sumber pendapatan, yang mengakibatkan stagnasi ekonomi dan ketidakmampuan untuk berinovasi atau beradaptasi dengan perubahan pasar global (Saputra et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi kemiskinan di Gorontalo dan wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Penelitian Ramirez, 2018 menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Penelitian lain oleh Rosmeli, 2018 menggaris bawahi pembangunan infrastruktur pedesaan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, dan akses terhadap air bersih, tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi lokal tetapi juga memperkuat konektivitas antara desa dan pusat-pusat ekonomi yang lebih besar. Penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan non-pertanian, serta menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengevaluasi perubahan kemiskinan dalam kerangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan kebijakan dan intervensi lokal yang dilakukan di Gorontalo.

Keunggulan dari penelitian ini adalah pendekatannya yang komprehensif dalam mengevaluasi dinamika kemiskinan dengan memadukan analisis tren temporal dan spasial. Penelitian ini tidak hanya melihat indikator ekonomi seperti pendapatan, tetapi juga mengintegrasikan dimensi pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial untuk memberikan gambaran yang lebih holistik.

Meskipun demikian, keterbatasan studi ini adalah ketergantungannya pada data sekunder, yang dapat mengurangi kemampuan untuk menangkap perspektif kualitatif dari masyarakat yang terdampak langsung oleh kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah literatur dengan memberikan analisis berbasis bukti mengenai efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di Gorontalo selama satu dekade terakhir.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika kemiskinan di Provinsi Gorontalo selama periode 2012–2022, dengan fokus pada tren perubahan, penyebab mendasar, dan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program pengentasan kemiskinan, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Berdasarkan fakta yang tersedia, argumen penelitian ini adalah bahwa kemiskinan di Gorontalo merupakan hasil dari interaksi antara ketimpangan regional, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta ketergantungan ekonomi pada sektor primer. Dengan demikian, intervensi yang lebih terarah dan berbasis bukti diperlukan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis dengan menyediakan wawasan yang dapat digunakan untuk mendukung formulasi kebijakan pengentasan kemiskinan, tidak hanya di Gorontalo tetapi juga di wilayah lain dengan karakteristik sosial-ekonomi serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada Provinsi Gorontalo, yang dipilih karena tingkat kemiskinannya relatif tinggi dan menghadapi tantangan seperti kesenjangan wilayah perkotaan-pedesaan, ketergantungan pada sektor pertanian, serta keterbatasan infrastruktur (BPS, 2022). Data yang digunakan mencakup kurun waktu 2012–2022 untuk menganalisis tren kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial-ekonomi secara longitudinal.

Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kemiskinan berdasarkan data sekunder. Data utama diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk indikator kemiskinan, garis kemiskinan, Indeks Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Laporan dari pemerintah daerah Gorontalo dan United Nations Development Programme (UNDP) juga digunakan untuk melengkapi data pembangunan manusia (UNDP, 2022). Data dikumpulkan melalui dokumentasi laporan resmi yang relevan dan divalidasi menggunakan standar data terpercaya.

Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk mengidentifikasi rata-rata, tren, dan perubahan temporal pada indikator utama. Analisis tren digunakan untuk mengevaluasi perubahan kemiskinan dan IPM selama periode 2012–2022, sementara analisis spasial membandingkan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Visualisasi data, seperti grafik dan diagram batang, diterapkan untuk mempermudah interpretasi hasil (Ramirez, 2018).

Literatur Review

Dimensi Kemiskinan

Dimensi kemiskinan telah berkembang dari perspektif tradisional yang berfokus pada pendapatan menjadi pemahaman multidimensional yang mencakup berbagai aspek kesejahteraan manusia. (Sen, 1999) dalam *Development as Freedom* menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya ketiadaan pendapatan, tetapi juga kekurangan kemampuan (*capabilities*) untuk mencapai kehidupan yang bermakna, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebebasan sosial. United Nations Development Programme (UNDP) juga memperkenalkan Indeks Kemiskinan Multidimensi (*Multidimensional Poverty Index, MPI*), yang mengukur kemiskinan melalui indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dalam konteks negara berkembang, penelitian menunjukkan bahwa dimensi non-ekonomi seperti rendahnya partisipasi pendidikan dan buruknya kondisi kesehatan, seperti prevalensi stunting, memainkan peran signifikan dalam memperburuk kemiskinan (Bourguignon & Morrisson, 2002). Dengan pendekatan ini, pengukuran kemiskinan menjadi lebih komprehensif, memungkinkan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi tantangan struktural yang berkontribusi pada siklus kemiskinan.

Penelitian sebelumnya oleh (Ramirez, 2018) menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan signifikan dalam mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. (Rediansyah et al., 2023) menyoroti Pembangunan infrastruktur yang memadai dan merata di seluruh wilayah suatu negara akan mempermudah para pelaku ekonomi dalam mengakses dan menjalankan kegiatan perekonomian. Studi ini memperkuat pemahaman bahwa pendekatan multidimensional diperlukan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan secara holistik.

Faktor Struktural dan Regional

Faktor struktural dan regional memainkan peran penting dalam memengaruhi kemiskinan, terutama di wilayah yang kurang berkembang seperti Gorontalo. Menurut teori ketergantungan (dependency theory), wilayah yang bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan cenderung terjebak dalam siklus rendahnya produktivitas, akses pasar yang terbatas, dan ketiadaan teknologi modern (Abdullahi et al., 2023). Penelitian oleh ketimpangan regional, seperti kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, dapat memperburuk distribusi manfaat pembangunan (Liddle, 2017). Selain itu, Infrastruktur yang buruk, seperti jalan, sekolah, dan layanan kesehatan, dapat menghambat pembangunan dan pemerataan di daerah pedesaan. Penelitian menunjukkan bahwa selain teknologi informasi dan komunikasi (TIK), infrastruktur lain seperti jalan dan listrik serta pemerataan pembangunan yang dapat dilihat melalui PDRB per kapita juga diperlukan untuk mengurangi kemiskinan (Nisa & Budiarti, 2020). Studi (Sukma, 2015) menegaskan bahwa Investasi pada infrastruktur pedesaan, seperti infrastruktur telekomunikasi, jalan, sanitasi, dan listrik, dapat meningkatkan status ekonomi masyarakat miskin melalui peningkatan pendapatan dan perbaikan pola konsumsi. Pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar wilayah (W. & Gusni, 2019). Selain itu, pengembangan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan pembangunan infrastruktur menjadi strategi penting dalam mengatasi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Edison & Andriansyah, 2023).

Wilayah pedesaan yang jauh dari pusat ekonomi menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar untuk menjual produk mereka (Dickson et al., 2016), menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan berkualitas, terutama pendidikan tinggi (Ray et al., 2014), dan sering kekurangan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan (Phutke et al., 2020), yang secara signifikan memperburuk tingkat kemiskinan. Di negara berkembang lainnya, (Bourguignon & Morrisson, 2002) menyoroti bahwa ketimpangan infrastruktur seperti akses jalan dan listrik memperburuk ketimpangan regional dan menghambat pertumbuhan inklusif. Di Indonesia, beberapa studi menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur pedesaan, seperti irigasi untuk pertanian, berkontribusi pada rendahnya produktivitas petani di daerah terpencil (Hildayanti et al., 2023), (Sutrisno & Hamdani, 2020), (Hadiwijoyo & Khairina, 2022), (W & Gusni, 2019). Selain itu, studi oleh Santoso dan Widodo (2020) menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki konektivitas transportasi yang baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah karena masyarakat dapat mengakses pasar dan peluang kerja dengan lebih mudah. Wilayah dengan transportasi yang berkualitas lebih tinggi dan lebih mudah diakses cenderung mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam hal produktivitas, pertumbuhan bisnis, dan pengurangan kemiskinan (Medeiros et al., 2021), Gibson & Olivia, 2010). Kedua perspektif ini menunjukkan bahwa mengatasi kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan faktor geografis, infrastruktur, dan aksesibilitas, baik dalam konteks lokal maupun internasional. Dengan demikian, intervensi yang fokus pada perbaikan akses fisik dan layanan dasar menjadi elemen penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di wilayah tertinggal.

Efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan

Efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada desain, implementasi, dan kontekstualisasi kebijakan dengan kebutuhan lokal. Menurut (Sen, 1999), kebijakan yang berhasil harus memperluas kemampuan individu untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Di Indonesia, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dan akses kesehatan pada kelompok miskin (Badan Pusat Statistik, 2022). Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa program bantuan pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Akib & Risfaisal, 2017) dan Program Keluarga Harapan (PKH) (Kharisma, 2019) sering kali tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh proses pendataan yang buruk serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (Akib & Risfaisal, 2017). Selain itu, penggunaan metode klasifikasi yang tidak optimal juga dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan penerima bantuan (Joshua Agung Nurcahyo & Theopilus Bayu Sasongko, 2023). masalah penargetan yang tidak tepat dapat menyebabkan program tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berbasis komunitas memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan dibandingkan program berskala nasional. (Nasution, 2017) menemukan bahwa kebijakan berbasis komunitas mampu memanfaatkan modal sosial yang ada di masyarakat, sehingga memberikan dampak yang lebih signifikan. Sebaliknya, program pengentasan kemiskinan berskala nasional sering menghadapi tantangan dalam ketepatan sasaran, seperti validasi data penerima bantuan yang kurang akurat (Sobari & Zuama, 2023).

Keunggulan kebijakan berbasis komunitas juga terletak pada pelibatan aktif masyarakat lokal, yang memungkinkan implementasi program menjadi lebih tepat sasaran (Okuputra & Nasikh, 2022). Selain itu, pendekatan ini mendorong pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di pedesaan (Okuputra & Nasikh, 2022). Pendekatan ini juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam mengembangkan program pembangunan ekonomi hijau yang berfokus pada kelestarian lingkungan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan (Sasmita et al., 2021).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan berbasis komunitas lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat pedesaan. Dengan memanfaatkan modal sosial, melibatkan partisipasi lokal, dan mendorong pemberdayaan serta kelestarian lingkungan, kebijakan ini memberikan solusi yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan.

Penelitian (Hutabarat, 2016) menemukan bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur pedesaan, seperti jalan, irigasi, listrik, dan fasilitas kesehatan, terbukti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Hal ini karena infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan akses masyarakat ke pasar, sumber daya, dan layanan dasar, sehingga mendorong aktivitas ekonomi dan produktivitas ((Rokhmat et al., 2020); , (Sutrisno et al., 2024). Selain itu, perbaikan infrastruktur juga dapat mengurangi biaya transaksi dan distribusi produk pertanian, serta meningkatkan investasi swasta di pedesaan ((Rokhmat et al., 2020). Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di pedesaan juga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan, dan ketergantungan masyarakat pada bantuan (Dara Haura Dharana et al., 2024; , (Alawiyah & Setiawan, 2021). Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan harus dilengkapi dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan (Alawiyah & Setiawan, 2021, Hermanto, 2018). Selain itu, transfer bantuan sosial juga terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan (Arifin & Ashari, 2023) Namun, bantuan sosial harus disertai dengan upaya pembangunan modal sosial dan partisipasi masyarakat agar dapat berkelanjutan (Nasution, 2017 , Kharisma et al., 2020). Dengan demikian, pendekatan holistik yang menggabungkan investasi infrastruktur, penguatan kapasitas, dan transfer bantuan menjadi kunci efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di pedesaan (Hutabarat, 2016, Alawiyah & Setiawan, 2021, Hermanto, 2018). Kebijakan ini harus dilaksanakan secara transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait (Nainggolan, 2016). Penelitian oleh Santoso dan Widodo (2020) menunjukkan bahwa program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) berkontribusi dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin (Sutrisno et al., 2024), tetapi dampaknya cenderung jangka pendek jika tidak disertai dengan program pemberdayaan ekonomi (Dara Haura Dharana et al., 2024). Studi (Sarjiyanto, 2022) menemukan bahwa intervensi seperti subsidi pertanian dan pembangunan infrastruktur pedesaan dapat meningkatkan produktivitas, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan masyarakat pedesaan pada bantuan pemerintah. Penelitian oleh (Bourguignon & Morrisson, 2002) di negara-negara berkembang lainnya menyoroiti bahwa program berbasis komunitas sering kali lebih berhasil karena melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, sehingga meningkatkan keberlanjutan program. Berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mencakup bantuan langsung tetapi juga strategi jangka panjang seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas, dan investasi infrastruktur. Hal ini relevan untuk memastikan bahwa intervensi kebijakan dapat membawa perubahan yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan di Provinsi Gorontalo dikaji melalui tiga kerangka utama: kemiskinan absolut, relatif, dan kultural. Kemiskinan absolut mengacu pada individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan relatif merujuk pada mereka yang hidup di atas garis kemiskinan tetapi tetap kurang sejahtera dibandingkan masyarakat sekitarnya. Sementara itu, kemiskinan kultural terkait dengan sikap atau kebiasaan yang menghambat usaha memperbaiki taraf hidup, meskipun terdapat bantuan eksternal

Tren Garis Kemiskinan

Selama periode 2012–2022, garis kemiskinan di Gorontalo mengalami peningkatan yang mencerminkan dampak inflasi dan perubahan ekonomi. Garis kemiskinan di wilayah perkotaan meningkat lebih tajam dibandingkan pedesaan, menunjukkan kesenjangan ekonomi yang makin lebar. Di perkotaan, garis kemiskinan naik dari rata-rata Rp 383.034 (2012–2017) menjadi Rp 544.478 (2017–2022), sementara di pedesaan meningkat dari Rp 275.126 menjadi Rp 372.182 dalam periode yang sama. Sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.



Gambar 1 Perbandingan Garis Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan Gorontalo 2012-2022

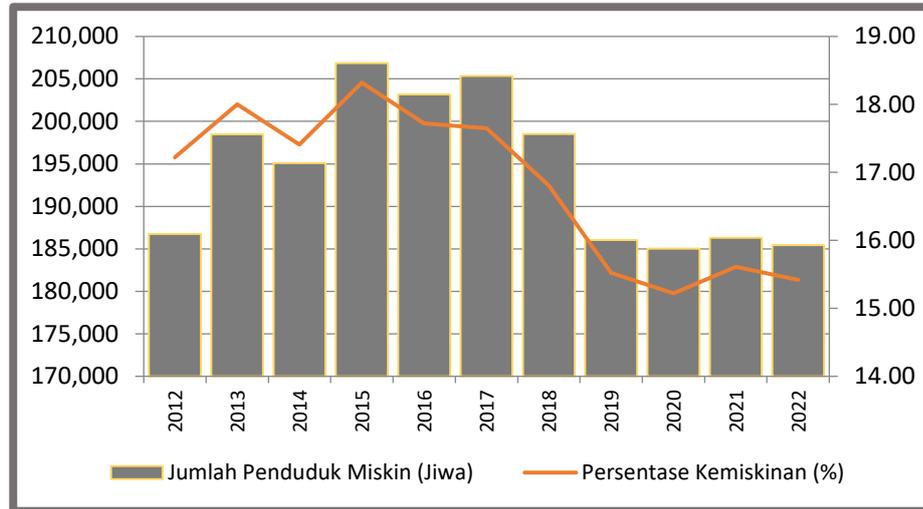
Gambar di atas menunjukkan perbandingan tren garis kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Provinsi Gorontalo dari tahun 2012 hingga 2022. Garis kemiskinan di perkotaan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan pedesaan, mencerminkan perbedaan biaya hidup antara kedua wilayah. Perbedaan ini menggarisbawahi ketimpangan ekonomi yang semakin besar, di mana pertumbuhan ekonomi perkotaan tidak selalu menguntungkan penduduk pedesaan. Temuan ini mendukung argumen (Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, 2020) ketimpangan ekonomi sering kali disebabkan oleh perbedaan akses terhadap sumber daya, termasuk pendidikan, teknologi, dan pasar, yang secara signifikan memengaruhi peluang individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tren garis kemiskinan di Provinsi Gorontalo selama periode 2012–2022 menunjukkan pola peningkatan, yang sebagian besar mencerminkan dampak inflasi dan perubahan struktur ekonomi di wilayah tersebut. Peningkatan ini terlihat lebih tajam di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan, menggambarkan perbedaan biaya hidup yang signifikan. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Susilowati & Maulana, 2012), yang menunjukkan bahwa garis kemiskinan di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi karena pengaruh urbanisasi dan tekanan biaya hidup, seperti harga pangan dan perumahan. Hubungan antara luas lahan pertanian dan kesejahteraan petani, serta urgensi kebijakan reforma agraria dalam meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Namun, di Gorontalo, kondisi ini juga diperburuk oleh konsentrasi kegiatan ekonomi yang masih terkonsentrasi di daerah perkotaan, sehingga menciptakan ketimpangan yang lebih besar antara perkotaan dan pedesaan.

Temuan ini sejalan pula dengan literatur yang menyoroti hubungan erat antara ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Penelitian sebelumnya oleh (Adelman, 2012) mengemukakan bahwa urbanisasi dan transformasi ekonomi sering kali memperbesar kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam konteks Gorontalo, transformasi ekonomi yang terpusat di wilayah perkotaan menyebabkan peningkatan garis kemiskinan yang lebih tinggi di sana, yang mengindikasikan beban hidup yang lebih berat bagi masyarakat urban.

Dinamika garis kemiskinan di Gorontalo juga sejalan dengan temuan (Bourguignon & Morrisson, 2002), yang menyoroti bahwa kebijakan yang tidak memperhatikan faktor geografis sering kali gagal mengurangi ketimpangan regional. Upaya penanggulangan kemiskinan di Gorontalo memerlukan strategi yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Misalnya, di wilayah perkotaan, kebijakan perlu difokuskan pada pengendalian inflasi dan penyediaan perumahan yang terjangkau, sementara di pedesaan, penguatan sektor pertanian dan infrastruktur menjadi prioritas. Dengan demikian, pendekatan yang terintegrasi dapat membantu menurunkan garis kemiskinan secara signifikan di kedua wilayah dan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin menunjukkan fluktuasi selama periode kajian. Pada tahun 2012, sekitar 186.760 orang (17,22%) hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini meningkat menjadi 205.370 (17,65%) pada tahun 2017, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan demografis. Namun, pada 2022 terjadi penurunan menjadi 185.440 orang (15,42%) berkat intervensi pemerintah yang lebih terarah serta perbaikan ekonomi.



Gambar 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Gorontalo 2012-2022
 Sumber : BPS, Provinsi Gorontalo (2023)

Dalam analisis jumlah dan persentase penduduk miskin, terlihat bahwa dinamika kemiskinan di Gorontalo mencerminkan tantangan multidimensi yang juga ditemukan dalam penelitian serupa di berbagai daerah. Sebagai contoh, penelitian oleh (Jalan & Ravallion, 2002) di Tiongkok menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan sering terhambat oleh keterbatasan akses ke pasar dan layanan dasar. Hal ini sejalan dengan temuan di Gorontalo, di mana tingginya ketergantungan pada sektor pertanian dengan produktivitas rendah dan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan memperparah angka kemiskinan. Dinamika ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis wilayah yang mempertimbangkan perbedaan geografis dan sosial-ekonomi dalam strategi pengentasan kemiskinan.

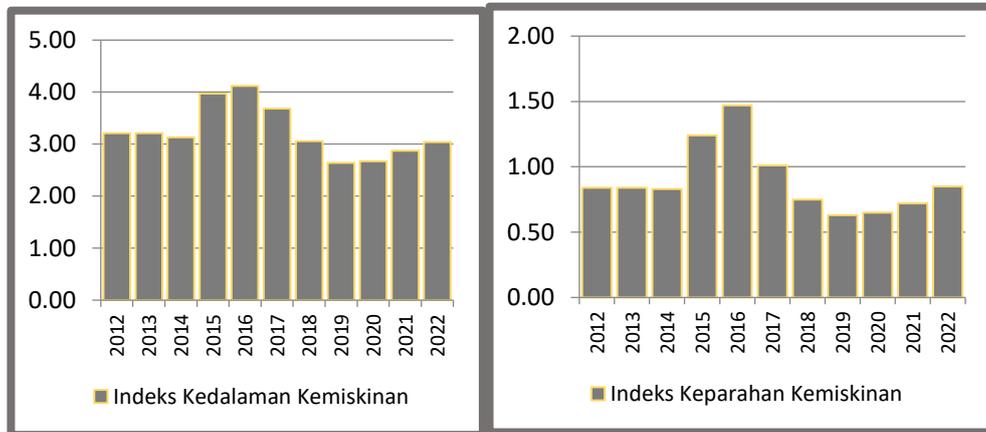
Perbandingan lebih lanjut dapat dilihat pada efektivitas kebijakan. Penelitian sebelumnya oleh (Khomaini, 2020) menyoroti bahwa bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya memiliki dampak jangka pendek jika tidak disertai dengan program pemberdayaan ekonomi. Temuan ini relevan dengan kasus Gorontalo, di mana program pemerintah seperti Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang hanya mencakup sebagian kecil masyarakat miskin berpotensi memiliki dampak signifikan jika skalanya diperluas. Namun, perlu ada pendekatan yang lebih menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan program ini, termasuk investasi pada pengembangan kapasitas dan peningkatan infrastruktur lokal untuk mendukung aksesibilitas dan produktivitas.

Studi di negara berkembang lainnya, seperti penelitian Bourguignon dan Morrisson (2002), menunjukkan bahwa kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan sering kali memperburuk ketimpangan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks Gorontalo, meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin hingga 15,42% pada tahun 2022, disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi isu utama. Pendekatan yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur pedesaan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal dapat memberikan solusi jangka panjang. Hal ini didukung oleh literatur yang menyatakan bahwa strategi holistik berbasis multidimensi lebih efektif dalam memerangi akar permasalahan kemiskinan secara berkelanjutan.

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur jarak rata-rata pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menilai tingkat ketimpangan di

antara penduduk miskin. Selama 2012–2022, kedua indeks ini menunjukkan pola fluktuatif. Penurunan indeks pada tahun-tahun tertentu mencerminkan efektivitas program pengentasan kemiskinan, namun kenaikan kembali di tahun-tahun berikutnya mengindikasikan tantangan dalam konsistensi kebijakan.



Sumber : BPS, Provinsi Gorontalo (2023)

Gambar 3 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Gorontalo

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan (P1 dan P2) merupakan alat penting untuk memahami dimensi kemiskinan yang melampaui sekadar jumlah penduduk miskin, karena keduanya menggambarkan intensitas dan ketimpangan kemiskinan di antara masyarakat miskin. Dalam konteks Gorontalo, data menunjukkan pola fluktuatif selama satu dekade terakhir, mencerminkan tantangan dalam menjaga konsistensi kebijakan pengentasan kemiskinan. Fenomena serupa ditemukan dalam penelitian (Ravallion & Chen, 2011) yang mengkaji kemiskinan di Tiongkok, di mana indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menurun saat kebijakan berbasis komunitas diterapkan, tetapi meningkat kembali ketika kebijakan tersebut dihentikan atau kurang mendapat dukungan. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang berkelanjutan untuk menangani kemiskinan secara lebih efektif, termasuk di Gorontalo. Studi yang dilakukan (Susilowati & Maulana, 2012) di Indonesia menyoroti bahwa indeks kedalaman kemiskinan sering kali lebih tinggi di wilayah pedesaan karena keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar. Di Gorontalo, hal serupa terlihat dari perbedaan signifikan antara perkotaan dan pedesaan dalam hal akses pendidikan dan kesehatan, yang berkontribusi pada ketimpangan penghasilan di kalangan penduduk miskin. Ketimpangan ini tidak hanya memperbesar kedalaman kemiskinan tetapi juga memperburuk keparahan karena kelompok masyarakat termiskin sering kali berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan kelompok lainnya. Oleh karena itu, intervensi yang berfokus pada penguatan infrastruktur pedesaan dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi intensitas dan ketimpangan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Bourguignon & Morrisson, 2002) menegaskan bahwa peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat secara signifikan mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dalam konteks Gorontalo, meskipun beberapa program pemerintah seperti bantuan kesehatan telah menunjukkan dampak positif, jangkauannya masih terbatas. Intervensi berbasis multidimensi yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan langsung dan mendorong kemandirian ekonomi. Selain itu, pendekatan berbasis data yang memetakan karakteristik kemiskinan di berbagai wilayah Gorontalo dapat membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih terfokus dan efektif dalam menurunkan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan secara berkelanjutan.

Intervensi Program Pemerintah untuk Penurunan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya mengurangi kemiskinan ekstrem. Dan pada tahun 2022 tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan hingga 8,17%. Hal ini sejalan dengan target nasional dalam Inpres No. 4 Tahun 2022. Penggunaan tolok ukur paritas daya beli (PPP) mendukung pencapaian ini. Program-program seperti peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja menjadi pilar utama pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dari sisi ekonomi terdapat beberapa program yang langsung kepada sasaran penerima manfaat sebagaimana yang tersaji pada Tabel 1.

Dari tabel, terlihat bahwa program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) hanya mencakup 500 penerima manfaat. Jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat miskin di Gorontalo. Namun, program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro. Hal ini relevan dengan pandangan Adelman (2012), yang menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi produktif untuk memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Tabel 1 Intervensi Program Pemerintah dan Jumlah Penerima Manfaat Provinsi Gorontalo

No	Nama Program Pemerintah	Jumlah Penerima Manfaat (Orang)
1	Bantuan Langsung Pangan (BLP3G)	80,000
2	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	500
3	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	n.a
4	Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI)	89,200
5	Bantuan Motor Coolbox	45
6	Pemanfaatan Data P3KE	n.a

Sumber : Data Sekunder diolah (2024)

Cakupan penerima manfaat dari program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat miskin. Penelitian oleh (Hidayah & Santoso, 2016) menunjukkan bahwa program bantuan sosial seperti ini dapat memberikan dampak positif, tetapi dampaknya sering bersifat jangka pendek jika tidak disertai dengan strategi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Di Gorontalo, program yang berfokus pada pengembangan kapasitas individu dan masyarakat, seperti UEP, memiliki potensi untuk menciptakan dampak jangka panjang jika ditingkatkan skala dan pengawasannya.

Pendekatan Gorontalo ini dapat dibandingkan dengan kebijakan serupa di wilayah lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat nasional yang berhasil meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Menurut studi (Sawitri & Rahmat, 2025), keberhasilan PKH sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan yang memperhatikan kebutuhan lokal dan penargetan yang tepat. Hal ini relevan dengan intervensi di Gorontalo, di mana tantangan utama adalah memastikan bahwa program mencapai kelompok yang paling membutuhkan. Sebagai contoh, program seperti Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) memiliki potensi untuk memberdayakan kelompok rentan, tetapi kurangnya data penerima manfaat menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan monitoring untuk memastikan dampak yang maksimal.

Selain itu, perbandingan dengan program di daerah lain, seperti inisiatif pengembangan infrastruktur pedesaan di Jawa Tengah, menunjukkan pentingnya investasi dalam infrastruktur sebagai pendorong utama pengentasan kemiskinan. Penelitian oleh (Awainah et al., 2024) infrastruktur yang memadai meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan yang baik mendukung proses belajar mengajar yang efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di Gorontalo, program seperti Bantuan Motor Coolbox menunjukkan upaya untuk mendukung sektor ekonomi lokal, tetapi masih diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis untuk meningkatkan konektivitas dan akses pasar. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data, intervensi pemerintah di Gorontalo dapat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Strategi Penurunan Kemiskinan

Strategi menurunkan kemiskinan di Provinsi Gorontalo memerlukan pendekatan yang terintegrasi untuk menangani tantangan multidimensi seperti ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Pertama, pemerintah dapat memperluas cakupan program seperti Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan mengembangkan kapasitas usaha mikro di pedesaan yang menjadi basis utama ekonomi lokal. Selain itu, pengembangan infrastruktur pedesaan, seperti jalan dan irigasi, akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar dan layanan penting, sekaligus

mendorong produktivitas sektor pertanian yang masih menjadi andalan utama perekonomian di wilayah tersebut. Strategi ini sejalan dengan teori pembangunan manusia yang dikemukakan oleh (Sen, 1999), yang menekankan pentingnya memperluas kemampuan (capabilities) individu untuk meningkatkan kesejahteraan. Program UEP yang diarahkan pada pengembangan usaha mikro di pedesaan sangat relevan dengan teori ini, karena memberdayakan masyarakat untuk menciptakan pendapatan secara mandiri. Strategi ini sesuai juga dengan penelitian (Ramirez, 2018) yang menunjukkan bahwa investasi dalam sektor produktif di daerah pedesaan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan langsung. Pembangunan infrastruktur pedesaan juga, seperti jalan dan irigasi, sejalan dengan teori ketergantungan (*dependency theory*), yang menyoroti pentingnya memutus ketergantungan ekonomi pada sektor primer dengan meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas dan teknologi modern (Adelman, 2012).

Strategi selanjutnya dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Gorontalo adalah memprioritaskan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, mengingat kedua sektor ini memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Pendidikan yang lebih inklusif tidak hanya meningkatkan kemampuan ekonomi individu tetapi juga menciptakan efek berantai dalam peningkatan kualitas hidup keluarga. Penelitian (Jalan & Ravallion, 2002) di Tiongkok menunjukkan bahwa pendidikan dasar yang berkualitas memiliki dampak signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan. Dalam konteks kesehatan, intervensi yang menargetkan penurunan stunting, seperti yang diprioritaskan dalam program nasional, terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan jangka panjang. Studi (W. & Gusni, 2019) menggarisbawahi pentingnya kesehatan sebagai investasi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, terutama di kalangan masyarakat miskin.

Strategi berikutnya yang dapat menurunkan kemiskinan di Provinsi Gorontalo adalah melalui intervensi berbasis komunitas, seperti pemberdayaan kelompok perempuan dan pemanfaatan teknologi digital, dapat mendorong kemandirian ekonomi. Pendekatan ini juga memperkuat teori social capital, yang menyatakan bahwa jaringan sosial yang kuat dapat menjadi pengungkit bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi. Penggunaan teknologi digital untuk memantau dan mengevaluasi program secara real-time, seperti yang direkomendasikan oleh (Bourguignon & Morrisson, 2002), juga relevan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Strategi-strategi ini, jika diimplementasikan secara konsisten, diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyajikan analisis komprehensif mengenai dimensi kemiskinan di Provinsi Gorontalo selama periode 2012–2022, dengan fokus pada tren perubahan, faktor-faktor penyebab, dan efektivitas kebijakan pengentasan. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan secara keseluruhan menurun dari 17,22% pada 2012 menjadi 15,42% pada 2022, disparitas antara perkotaan dan pedesaan tetap signifikan. Garis kemiskinan perkotaan meningkat lebih tajam dibandingkan pedesaan, mencerminkan kesenjangan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Ketergantungan pada sektor primer dengan produktivitas rendah juga menjadi tantangan utama.

Implikasi dari temuan penelitian ini diperlukan strategi pendekatan kebijakan berbasis bukti yang lebih adaptif dan terfokus dalam menurunkan kemiskinan, seperti investasi pada infrastruktur pedesaan, penguatan kapasitas lokal, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Program seperti Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) memiliki potensi signifikan, tetapi skalanya masih terbatas untuk mencapai dampak berkelanjutan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan analisis tren temporal dan spasial, sehingga memberikan perspektif holistik dalam memahami dinamika kemiskinan di Gorontalo. Studi ini juga memperluas literatur dengan mengidentifikasi kelemahan implementasi kebijakan lokal dan menawarkan rekomendasi strategis untuk perbaikan.

Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada eksplorasi kualitatif mengenai pengalaman langsung masyarakat miskin untuk melengkapi analisis kuantitatif. Selain itu, evaluasi kebijakan berbasis data primer dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai efektivitas intervensi, khususnya dalam konteks perbedaan geografis dan sosial-ekonomi. Upaya ini penting untuk mendukung formulasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, B., Idris Pindiga, I., & Musa, A. (2023). Food insecurity and economic dependency in Nigeria. *Journal of Administrative and Business Studies*, 9(1), 24–31. <https://doi.org/10.20474/jabs-9.1.3>
- Adelman, I. (2012). *Theories of Economic Growth and Development*. Stanford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=mEKsAAAAIAAJ>
- Akib, I., & Risfaisal, R. (2017). Bantuan Langsung Tunai. *Equilibrium Jurnal Pendidikan*, 3(2). <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i2.283>
- Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa. *Jurnal Sosiologi Usk (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15(2), 131–154. <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>
- Arifin, B., & Ashari, D. W. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Surat Berharga Negara (Sbn) Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia: Masa Normal Dan Masa Pandemi Covid-19 (2020-2022). 8(1), 85–99. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i1.156>
- Awainah, N., Sulfiana, Nurhaedah, Jamaluddin, & Aminullah, A. (2024). Peran Infrastruktur Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 6847–6854.
- Bourguignon, F., & Morrisson, C. (2002). Inequality among world citizens: 1820-1992. *American Economic Review*, 92(4), 727–744. <https://doi.org/10.1257/00028280260344443>
- BPS. (2022). *Statistik Kemiskinan Provinsi Gorontalo*. <https://gorontalo.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg3IZI=/poverty-indicators-of-gorontalo-province.html>
- Dara Haura Dharana, N., Rezqita Asharizah Arbani, N., & Ichsan Fauzi Rachman, N. (2024). Membangun Kualitas Hidup Melalui Literasi (Analisis Kasus Masyarakat Sunda). 1(3), 79–86. <https://doi.org/10.62017/jkmi.v1i3.1257>
- Dickson, K. S., Adde, K. S., & Amu, H. (2016). What Influences Where They Give Birth? Determinants of Place of Delivery among Women in Rural Ghana. *International Journal of Reproductive Medicine*, 2016, 1–8. <https://doi.org/10.1155/2016/7203980>
- Edison, E., & Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan di Indonesia. *Journal Development*, 11(2), 134–147. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.323>
- Gibson, J., & Olivia, S. (2010). The Effect of Infrastructure Access and Quality on Non-Farm Enterprises in Rural Indonesia. *World Development*, 38(5), 717–726. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.010>
- Hadiwijoyo, S. S., & Khairina, N. G. (2022). Hirarki Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Infrastruktur Dasar Di Kecamatan Argomulyo, Salatiga Tahun 2020. *Kritis*, 31(1), 17–37. <https://doi.org/10.24246/kritis.v31i1p17-37>
- Hermanto, N. (2018). Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan: Pengembangan SDM, Penguatan Usaha, Dan Inovasi Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 35(2), 139. <https://doi.org/10.21082/fae.v35n2.2017.139-150>
- Hidayah, U., & Santoso, B. (2016). *Faktor-faktor Pengembangan Agroindustri Berbasis. June 2020*.
- Hildayanti, S. K., Alie, J., & Setiadi, B. (2023). Merayakan Keanekaragaman Kita: Mempromosikan Inklusivitas, Pemahaman Budaya, Keterlibatan Masyarakat, Dan Kebanggaan Komunitas. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(05), 325–334. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i5.372>
- Hutabarat, B. (2016). Investasi Publik Pada Sektor Pertanian Di Era Otonomi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 19(2), 24. <https://doi.org/10.21082/fae.v19n2.2001.24-37>
- Jalan, J., & Ravallion, M. (2002). Geographic poverty traps? A micro model of consumption growth in rural China. *Journal of Applied Econometrics*, 17(4), 329–346. <https://doi.org/10.1002/jae.645>
- Joshua Agung Nurcahyo, N., & Theopilus Bayu Sasongko, N. (2023). Hyperparameter Tuning Algorithm Supervised Learning Untuk Klasifikasi Keluarga Penerima Bantuan Pangan Beras. *Indonesian Journal of Computer Science*, 12(3). <https://doi.org/10.33022/ijcs.v12i3.3254>
- Kharisma, B. (2019). Apakah Transfer Tunai Pemerintah Memperburuk Modal Sosial? Kasus Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12(2), 40. <https://doi.org/10.24843/jekt.2019.v12.i02.p03>
- Kharisma, B., Remi, S. S., Wardhana, A., & Minarso, D. (2020). Modal Sosial Dan Kemiskinan Di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 317–338. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.3303>
- Khomaini, A. A. (2020). Dampak Program Bantuan Tunai (Cash Transfer) terhadap Kesejahteraan Subyektif di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.161>
- Liddle, B. (2017). *Urbanization and Inequality / Poverty. i*, 1–7. <https://doi.org/10.3390/urbansci1040035>
- Medeiros, V., Ribeiro, R. S. M., & Amaral, P. (2021). Infrastructure and Household Poverty in Brazil: A Regional Approach Using Multilevel Models. *World Development*, 137, 105118. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105118>

- Michael P. Todaro & Stephen C. Smith. (2020). *Economic Development*. https://students.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlineBook/F5v9e6_EconomicDevelopment-2020.pdf
- Nainggolan, K. (2016). Strategies for Improving Coordination Between the Public and Private Institutions for Agricultural and Rural Development. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(2), 20. <https://doi.org/10.21082/fae.v20n2.2002.20-30>
- Nasution, A. (2017). Kebijakan Pembentukan Modal Sosial Dan Pengurangan Kemiskinan Di Rumah Tangga Perdesaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 171. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i2.672>
- Nisa, K., & Budiarti, W. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2012-2017. *Seminar Nasional Official Statistics, 2019(1)*, 759-768. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.186>
- Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan. *Inovasi*, 18(1), 159-166. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10379>
- Phutke, G., Patil, S., & Jain, Y. (2020). Ethical qualms while treating diabetes in low resource areas. *Indian Journal of Medical Ethics*, 5(1), 49-53. <https://doi.org/10.20529/IJME.2020.019>
- Ramirez, A. (2018). The Impact of Investment in Education and Health on Poverty Reduction in Rural Areas. *Journal of Rural Development*, 2(45), 123-145.
- Ravallion, M., & Chen, S. (2011). Weakly Relative Poverty. *The Review of Economics and Statistics*, 93(4), 1251-1261. https://doi.org/10.1162/REST_a_00127
- Ray, R. A., Fried, O., & Lindsay, D. (2014). Palliative care professional education via video conference builds confidence to deliver palliative care in rural and remote locations. *BMC Health Services Research*, 14(1), 1-8. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-272>
- Rediansyah, G., Khoirudin, R., & Yuniarti, D. (2023). Pengaruh Infrastruktur, Air dan Listrik Terhadap Perekonomian Daerah di Kabupaten Banjarnegara. *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.47134/jees.v1i1.57>
- Rokhmat, A., Sasana, H., Sbm, N., & Yusuf, E. (2020). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Jalan Provinsi, Air Bersih, Hotel, Penginapan Dan Restoran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 70. <https://doi.org/10.26623/jreb.v13i2.2598>
- Rosmeli, R. (2018). Dampak Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 1-7. <https://doi.org/https://online-journal.unja.ac.id/index.php/JSSH/article/view/5284>
- Saputra, E., Reinhart, H., Khairina, N. G., Nurhikmah, I., Syakbana, Z. P., & Anwar, M. S. (2024). Regional Analysis for Sustainable Economic Development: A Case Study of Sukamara Regency, Kalimantan Tengah, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1313(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1313/1/012042>
- Sarjiyanto, S. (2022). Moderating Effect of Social Capital on Community Empowerment and Economic Well-Being. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(6), 479-492. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.15325>
- Sasmita, P. Y., Restiatun, R., & Yani, A. (2021). Determinan Indeks Pembangunan Berkelanjutan Di 34 Provinsi Indonesia. *Sebatik*, 25(2), 399-404. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1378>
- Sawitri, N., & Rahmat, W. (2025). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaca Pengetasan Kemiskinan di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cembaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. 06(01), 1-13.
- Sen, A. (1999). *Evaluative Reason*: Oxford: Oxford University Press, 5.
- Sobari, I. A., & Zuama, R. A. (2023). Pendekatan Machine Learning Dalam Memprediksi Keluarga Penerima Program PKH. *Jurnal Teknik Komputer*, 9(1), 61-64. <https://doi.org/10.31294/jtk.v9i1.14165>
- Sukma, A. F. (2015). Efek Pengganda Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Perekonomian Provinsi Bali. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 26(2), 100-110. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2015.26.2.3>
- Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). Farm Business Land Size and Farmers' Welfare: Smallholders' Existence and Agrarian Reform Urgency. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(1), 17-30. <https://media.neliti.com/media/publications/53965-ID-luas-lahan-usaha-tani-dan-kesejahteraan-p.pdf>
- Sutrisno, N., & Hamdani, A. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 13(2), 73. <https://doi.org/10.21082/jsdl.v13n2.2019.73-88>
- Sutrisno, N., Tri Wahyuni, N., & Mardiani, N. (2024). Pengembangan Infrastruktur Dalam Usaha Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Transmigran Desa Parit Keladi 1, Pontianak: Studi Fenomenologi. *Abdimas Awang Long*, 7(2), 163-173. <https://doi.org/10.56301/awal.v7i2.1210>
- Utama, W., & Soesanti, N. (2019). Hubungan antara Partisipasi Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 19(1), 136-148.

<https://doi.org/10.17509/jpp.v19i1.17139>

W., N. D., & Gusni. (2019). *PERTUMBUHAN EKONOMI DESA TERTINGGAL* Fakultas Ekonomi , Universitas Widyatama , Bandung , Indonesia Fakultas Bisnis dan Manajemen , Universitas Widyatama , Bandung , Indonesia Abstrak Pendahuluan Permasalahan struktural yang menjadi isu penting dalam tuju. 2(78), 171–182.

W, N. D., & Gusni, G. (2019). Pengaruh Infrastruktur Dasar Dan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa Tertinggal. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 171. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i02.p03>

(UNDP), U. N. D. P. (2022). *Human Development Report 2022: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World*.